



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Majapahit No.14 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 421731 Pos-el: dinperinaker@pekalongankota.go.id Laman: <https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/>

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEPUTUSAN
DAN/ATAU KEBIJAKAN DI SAHKAN**

No	Peraturan/Kebijakan	Bulan/Tahun Pembuatan
1.	Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Januari 2026
2.	Keputusan Walikota Tentang Penunjukan Tim Penatausahaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2026	Januari 2026
3.	Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2026	Januari 2026
4.	Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2026	Januari 2026

Pekalongan, 06 Maret 2026
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Pekalongan



Betty Daffani Dahlan, S.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690203 199803 2 004



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 700.1/ 0428 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam suatu Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Memperhatikan : 1. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 53);

2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

- a. menyusun infrastruktur SPIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- b. memfasilitasi pelaksanaan SPIP;
- c. mengkoordinasikan penerapan SPIP pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP Pemerintah Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan SPIP SKPD kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah.

KETIGA : Uraian Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan adalah selama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Januari 2026

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN




BETTY DAHFIANI DAHLAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 700.1/0428 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
 KERJA KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS DAN
 SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP
 DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Ketua
3	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Anggota
5	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Anggota
6	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Anggota
7	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Anggota
8	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Anggota
9	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Anggota

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN


 BETTY DAHFIANI DAHLAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 700.1/0428 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KOTA PEKALONGAN

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

1. PENANGGUNG JAWAB

Membina dan mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

2. KETUA

- Menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
- Menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP
- Memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
- Melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP kepada Pembina melalui Koordinator

3. SEKRETARIS

- Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi
- Membantu Ketua Satuan tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja
- Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP
- Membantu ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP.

4. ANGGOTA

- Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
- Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP
- Memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
- Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis atas penyelenggaraan SPIP di Instansi kerja .

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN



BETTY DAHFIANI DAHLAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 900.1.3/1372 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENATAUSAHAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2026 perlu ditunjuk Tim Penatausahaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tim Penatausahaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 88);
 2. Surat Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nomor B/891/900.1/2025 tanggal 9 Desember 2025 hal Persiapan Awal Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENATAUSAHAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.**

KESATU : Menunjuk Tim Penatausahaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penatausahaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. menyusun RKA SKPD;
 2. menyusun DPA SKPD/DPPA SKPD/DPAL SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 7. melaksanakan pemungutan bukan pajak;
 8. menandatangani SPM;
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. mengesahkan laporan pertanggungjawaban bendahara setelah diverifikasi PPK-SKPD; dan
 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut ;
1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 3. melakukan verifikasi SPP;
 4. menyiapkan SPM;
 5. melakukan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh Bendahara Penerima / Pengeluaran;
 6. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 7. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. mengendalikan pelaksana kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 4. bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan yang dikendalikannya;
 5. membantu PPKom dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
 6. menandatangani bukti pengeluaran atas penggunaan belanja.
- d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinperinaker, dan melaporkan SPT Masa Pajak;
 2. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 3. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 4. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari Pejabat Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang disampaikan oleh PPTK;
 7. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan
 8. menerima dan memverifikasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK/ Kasir Kegiatan.

- e. Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut;
 - 1. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal penginputan semua laporan SPJ di aplikasi SIPD RI;
 - 2. Membantu menscan semua data dukung lampiran SPJ;
 - 3. Membantu mengkoordinir dan merekap Buku Kas;
 - 4. Membantu penyusunan realisasi anggaran setiap bulan; dan
 - 5. Membantu membuat laporan Rekonsiliasi LRA per triwulan.

- f. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut;
 - 1. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 - 2. menyimpan seluruh penerimaan;
 - 3. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Jateng Cabang Pekalongan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya; dan
 - 4. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

- f. Bendahara Gaji :
 - 1. meneliti dan mengoreksi daftar gaji yang diterima dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan;
 - 2. menyiapkan SPP-LS gaji dan tunjangan berdasarkan daftar gaji;
 - 3. menyiapkan SPP-LS gaji dan tunjangan untuk rapel/kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain;
 - 4. membayarkan gaji kepada pegawai;
 - 5. membukukan SPP-LS gaji dan tunjangan, SPM-LS gaji dan tunjangan, SPJ gaji Pegawai dalam buku register;
 - 6. mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji BKU dan Buku perincian pengeluaran perincian obyek;
 - 7. membukukan PPh Gaji pada buku pajak;
 - 8. menyiapkan SPJ Gaji; dan
 - 9. membantu menyelesaikan kewajiban pegawai.

- g. Kasir Kegiatan :
 - 1. menyiapkan Dokumen administrasi yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPTK yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- h. Pengurus Barang Pengguna :
 - 1. membantu menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang persediaan;
 - 2. membantu pencatatan dan inventarisasi barang persediaan;
 - 3. membantu pencatatan masuknya barang persediaan dan penyaluran kepada pihak penerima;

4. membantu menyusun laporan barang persediaan tiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
5. membantu melakukan *stock opname* barang persediaan; dan
6. membantu melakukan rekonsiliasi dalam menyusun laporan khusus barang persediaan pengguna barang.

i. Pembantu Pengurus Barang Pengguna :

1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah yang ada di UPTD BLK;
2. membantu pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang ada di UPTD BLK;
3. membantu menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah yang ada di UPTD BLK;
4. membantu menyusun laporan barang tiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan yang ada di UPTD BLK;
5. membantu membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan yang ada di UPTD BLK;
6. membantu memberi label barang milik daerah yang ada di UPTD BLK; dan
7. membantu melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna barang dan laporan barang milik daerah yang ada di UPTD BLK;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Desember 2025

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KOTA PEKALONGAN,



BETTY DAHFIANI DAHLAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 900.1.3/1372 /2025
 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENATAUSAHAAN
 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENATAUSAHAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN KERJA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Betty Dahfiani Dahlan, S.T.	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	SK Walikota
2	Ninik Murniasih, S.Pd, M.M	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan	SK Kepala Dinas
3	Saffana Saniyya, S.M	Penelaah Teknis Kebijakan	Bendahara Pengeluaran	SK Walikota
4	Sofa Niskiyatul Umroti, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembantu Bendahara Pengeluaran	SK Kepala Dinas
5	Lusiana Putri Setyowati, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan	Bendahara Penerimaan	SK Walikota
6	Sri Wahyuni	Pengadministrasi Perkantoran	Pengurus Gaji Dinas	SK Kepala Dinas
7	Tri Udiono, S.Pd.,M.Pd.	Instruktur Ahli Muda	Pengurus Barang Pengguna	SK Kepala Dinas
8	Bayu Anggoro, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	SK Kepala Dinas
9	Subekti, S.E	Instruktur Ahli Pertama	Pembantu Pengurus Barang Pengguna UPTD BLK	SK Kepala Dinas

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KOTA PEKALONGAN



BETTY DAHFIANI DAHLAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 900.1.3/1372 /2025
 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENATAUSAHAAN
 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENATAUSAHAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PPTK		KASIR		KET.	
			NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ivan Permadi, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan (Selaku Plt. Kasubag. Renval dan Keuangan)	Rheka Diana Yani Putri, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ivan Permadi, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan (Selaku Plt. Kasubag. Renval dan Keuangan)	Rheka Diana Yani Putri, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ivan Permadi, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan (Selaku Plt. Kasubag. Renval dan Keuangan)	Rheka Diana Yani Putri, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	
		B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ivan Permadi, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan (Selaku	Sri Wahyuni	Pengadministrasi Perkantoran	

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PPTK		KASIR		KET.
			NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Plt. Kasubag. Renval dan Keuangan)			
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ivan Permadi, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan (Selaku Plt. Kasubag. Renval dan Keuangan)	Rheka Diana Yani Putri, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	
C Administrasi Umum Perangkat Daerah							
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Bayu Anggoro, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Johana Syafar, Amd.	Pranata SDM Aparatur Terampil	
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Bayu Anggoro, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	
		4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Johana Syafar, Amd.	Pranata SDM Aparatur Terampil	
		5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Bayu Anggoro, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Johana Syafar, Amd.	Pranata SDM Aparatur Terampil	
D Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Bayu Anggoro, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Johana Syafar, Amd.	Pranata SDM Aparatur Terampil	
E Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Johana Syafar, Amd.	Pranata SDM Aparatur Terampil	

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PPTK		KASIR		KET.
			NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Johana Syafar, Amd.	Pranata SDM Aparatur Terampil	
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Maghfiroh, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Johana Syafar, Amd.	Pranata SDM Aparatur Terampil	
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	A Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
		1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Wahyudi Subiyantoro, S.Pi., M.P.A.	Kepala Bidang Perindustrian	Mohammad Hafish Arnanta, S.T	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	
III	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	A Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					
		1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Wahyudi Subiyantoro, S.Pi., M.P.A.	Kepala Bidang Perindustrian	Kartika Ari Hidayati, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan	
IV	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	A Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					
		1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Nadia Paramita, M.M	Kabid Pentalattas	Vella Adrelia Erinta, S.Psi.	Analisis Pembelajaran Kursus dan Pelatihan	
		2 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Helmi Hendarsyah, S.T	Kepala UPTD BLK	Muchamad Makarim, Amd.	Kasubag. Tata Usaha UPTD BLK	

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PPTK		KASIR		KET.	
			NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
V	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	A Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota						
		1	Perluasan Kesempatan Kerja	Nadia Paramita, M.M	Kabid Pentalattas	Imam Mu'aziz, S.E	Pengantar Kerja Pertama	
		B Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						
		1	Job Fair/Bursa Kerja	Nadia Paramita, M.M	Kabid Pentalattas	Muhammad Yusuf, S.IP.	Pengantar Kerja Muda	
VI	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	A Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
		1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Ilena Palupi, S.Pt., M.Si.	Kabid. Hubin dan Jamsos	Fithri Yuliani Ayuningtyas, S.Psi.	Mediator Hubin Ahli Pertama	
		B Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
		1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ilena Palupi, S.Pt., M.Si.	Kabid. Hubin dan Jamsos	Lilis Suhaidah, S.H	Mediator Hubin Ahli Pertama	
		2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Ilena Palupi, S.Pt., M.Si.	Kabid. Hubin dan Jamsos	Lilis Suhaidah, S.H	Mediator Hubin Ahli Pertama	

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PPTK		KASIR		KET.
			NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Ilena Palupi, S.Pt., M.Si.	Kabid. Hubin dan Jamsos	Amelia Dwi Syifaunnufus, S.Psi.	Mediator Hubin Ahli Pertama	
		4 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Ilena Palupi, S.Pt., M.Si.	Kabid. Hubin dan Jamsos	Khairul Amri, S.ST	Mediator Hubin Ahli Muda	

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KOTA PEKALONGAN



BETTY DAHPIANI DAHLAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0451 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 555.05/0081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekalongan maka Keputusan Wali Kota dimaksud perlu disesuaikan
- b. Bahwa pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekalongan agar berdayaguna dan berhasilguna perlu perubahan terhadap susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksa pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja kota Pekalongan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu penyempurnaan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang

Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Pejabat Pelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sebagaimana dilampirkan pada Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
 2. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi
 - b. Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta emrta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi;

6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID dan;
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

- c. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 2. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
 3. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Anggota Bidang Pelayanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
 2. Mencatat permohonan informasi public dalam register permohonan; dan
 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- e. Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Informasi memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;
 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;
 3. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
 4. Menetapkan dan Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; dan
 6. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi
- f. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Pengelolaan dan pengembangan dibidang dokumentasi/arsip informasi publik;
 2. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 3. Melaksanakan proses penyimpanan

- pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik; dan
4. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
- g. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksanaan terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; dan
 3. Membantu menyelesaikan Informasi Publik.
- h. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government; dan
 2. Mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 15 Januari 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN



BETTY DAHEIANI DAHLAN

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 500.12.12/0451 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN
 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2026

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/ Instansi
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
2	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
3	Sekretaris	Kasubbag Renval dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Produktivitas
	Anggota	3 (tiga) orang tenaga pelaksana pada Bidang Penempatan Kerja dan Produktivitas
5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perindustrian
	Anggota	3 (tiga) orang tenaga pelaksana pada Bidang Perindustrian
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	3 (tiga) orang tenaga pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	Anggota	3 (tiga) orang tenaga pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

8	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Kepala UPTD BLK
	Anggota	3 (tiga) orang tenaga pelaksana pada UPTD BLK

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 15 Januari 2026

a.n WALL KOTA PEKALONGAN

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN



BETTY DAHFIANI DAHLAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 500.12.12/0452 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

- Menimbang
- : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, maka perlu membuat klasifikasi daftar informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Informasi Publik Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan tahun 2025;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan

- Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

- Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tanpa terkecuali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 15 Januari 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN

BETTY DAHLANI DAHLAN, ST



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR : TAHUN 2026
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

A. INFORMASI BERKALA

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	Profil Badan Publik	Berisi Profil dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan terdiri kedudukan, domisili, alamat lengkap Dinperinaker Kota Pekalongan, visi dan misi, tugas dan fungsi,	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
		struktur organisasi, serta profil pimpinan						
2	Profil Badan Publik - LHKPN	Berisi laporan harta kekayaan aparatur negara kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang di Dinperi-naker yang telah di upload di website KPK dan menjadi bagian dari profil badan public	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
3	Ringkasan Program dan Kegiatan yang sedang	Memuat informasi program dan kegiatan yang	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
	dijalankan	sedang dijalankan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja						html
4	Ringkasan Informasi tentang Kinerja - LKJIP	Memuat informasi tentang kinerja organisasi Dinperinaker selama 1 tahun	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
5	Ringkasan Informasi tentang Kinerja – Perjanjian Kinerja	Memuat perjanjian kinerja pegawai Dinperinaker Selama 1 Tahun	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
6	Ringkasan Informasi tentang Kinerja – LKJ Triwulan	Memuat hasil kinerja pegawai Dinperinaker selama 1 tahun	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
7	Ringkasan Laporan Keuangan	Memuat Rencana Kerja Anggaran	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
	Yang Telah di Audit - RKA	yang dibutuhkan untuk operasional Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan						/ppid/index.html
8	Ringkasan Laporan Keuangan Yang Telah di Audit - DPA	Memuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibutuhkan untuk operasional Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

1	Laporan Kinerja	Berisi informasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
---	-----------------	---	----------------	----------------	------	----------	----------------	---

1. Ringkasan Laporan Keuangan								
1	Ringkasan Laporan Keuangan	Berisi informasi ringkasan laporan keuangan yang memuat: a. LRA b. Neraca c. CALK d. Daftar Aset e. Ringkasan RKA f. Ringkasan DPA	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
2. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik								
1	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	Berisi ringkasan informasi publik yang memuat: a. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak; d. Alasan Penolakan Permohonan Informasi	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

		Publik						
2	Laporan Tahunan PPID Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Berisikan tentang sarana, prasarana dan kegiatan yang selama satu tahun berjalan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
3	Register Permohonan Informasi Publik PPID Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Berisi tentang register permohonan informasi selama satu tahun yang sudah dijalankan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

3. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang mengikat

1	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan	Berisi informasi tentang rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundangundangan, keputusan, dan/atau	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
---	--	---	----------------	----------------	------	----------	----------------	---

	perundangda ngan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses embuatan	kebijakan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan						
2	Daftar peraturan perundang, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan	Berisi tentang daftar peraturan perundangundangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

4. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik

1	Tata cara memperoleh informasi publik	Berisi informasi tentang tata cara memperoleh informasi publik	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
2	Tata cara penga- -juan keberatan dan proses penyelesaian sengketa infor- masi publik berikut pihak- pihak yang	Berisi informasi tentang tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihakpihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

	bertanggung jawab yang dapat dihubungi							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat DINPERINAKER

1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat DINPERINAKER	Berisi informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat DINPERINAKER	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
---	--	---	----------------	----------------	------	----------	----------------	---

6. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1	Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa	Berisi informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang meliputi tahap perencanaan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
---	--	--	----------------	----------------	------	----------	----------------	---

7. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap Kantor Badan Publik

1	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Badan Publik	Berisikan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Badan Publik	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
8. Informasi tentang ketenagakerjaan								
1	Informasi tentang ketenagakerjaan	Berisikan informasi terkait tentang informasi ketenagakerjaan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
----	-----------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

1	Informasi yang dapat mengancam m hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	<p>Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi bencana alam; b. Informasi keadaan bencana non alam; c. Informasi bencana sosial; d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas Publik 	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
---	---	--	----------------	----------------	------	----------	----------------	---

C. INFORMASI

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintahan Kota Pekalongan	Berisi tentang: nomor, jenis informasi, ringkasan informasi, pejabat yang menguasai informasi, penanggung jawab informasi, waktu pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
2	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan	Memuat informasi tentang a. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk. b. Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan	Memuat informasi tentang a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; b. Profil lengkap pimpinan dan pegawai.	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalangankota.go.id/ppid/index.html
4	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;	Memuat dokumen perjanjian/MoU dan sejenisnya beserta dokumen pendukungnya	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalangankota.go.id/ppid/index.html
5	Surat menyurat pimpinan atau pejabat DINPERINAKER dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya	Memuat tentang dokumen surat menyurat pimpinan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalangankota.go.id/ppid/index.html

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
6	Data perbendaharaan atau inventaris	Berisi informasi tentang data perbendaharaan atau inventaris DINPERINAKER	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalongankota.go.id/ppid/index.html
7	Rencana Strategis dan rencana kerja Badan Publik	Berisi informasi agenda kerja dan kegiatan pimpinan DINPERINAKER	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalongankota.go.id/ppid/index.html
8	Agenda kerja satuan pimpinan satuan kerja	Berisi informasi agenda kerja dan kegiatan pimpinan DINPERINAKER	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalongankota.go.id/ppid/index.html

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
9	Informasi mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya b. Sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya c. Laporan penggunaan anggaran 	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalangankota.go.id/ppid/index.html
10	Jumlah dan jenis gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan	Memuat informasi jumlah dan jenis pelanggaran dalam pengawasan internal	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalangankota.go.id/ppid/index.html

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
11	Jumlah dan jenis gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat	Memuat informasi data aduan yang dilaporkan masyarakat, kategori aduan serta respon terhadap aduan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalangankota.go.id/ppid/index.html
12	Peraturan perundangundangan yang telah disahkan serta kajian akademiknya	Memuat informasi dokumen peraturan daerah yang telah disahkan beserta kajian naskah akademiknya	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalangankota.go.id/ppid/index.html
13	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan	Berisi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pegalangankota.go.id/ppid/index.html

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
14	Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan	Berisikan tentang laporan syarat perizinan beserta dokumen pendukung lainnya.	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
15	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan	Berisikan hasil data dari penelitian yang telah dilakukan	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
16	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum	Berisikan tentang informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

17	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa	Berisikan mengenai informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html
18	Informasi tentang standar pengumuman informasi	Berisikan terkait dengan pengumuman informasi	PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	2026	Softfile	Selama Berlaku	https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/ppid/index.html

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN



BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T